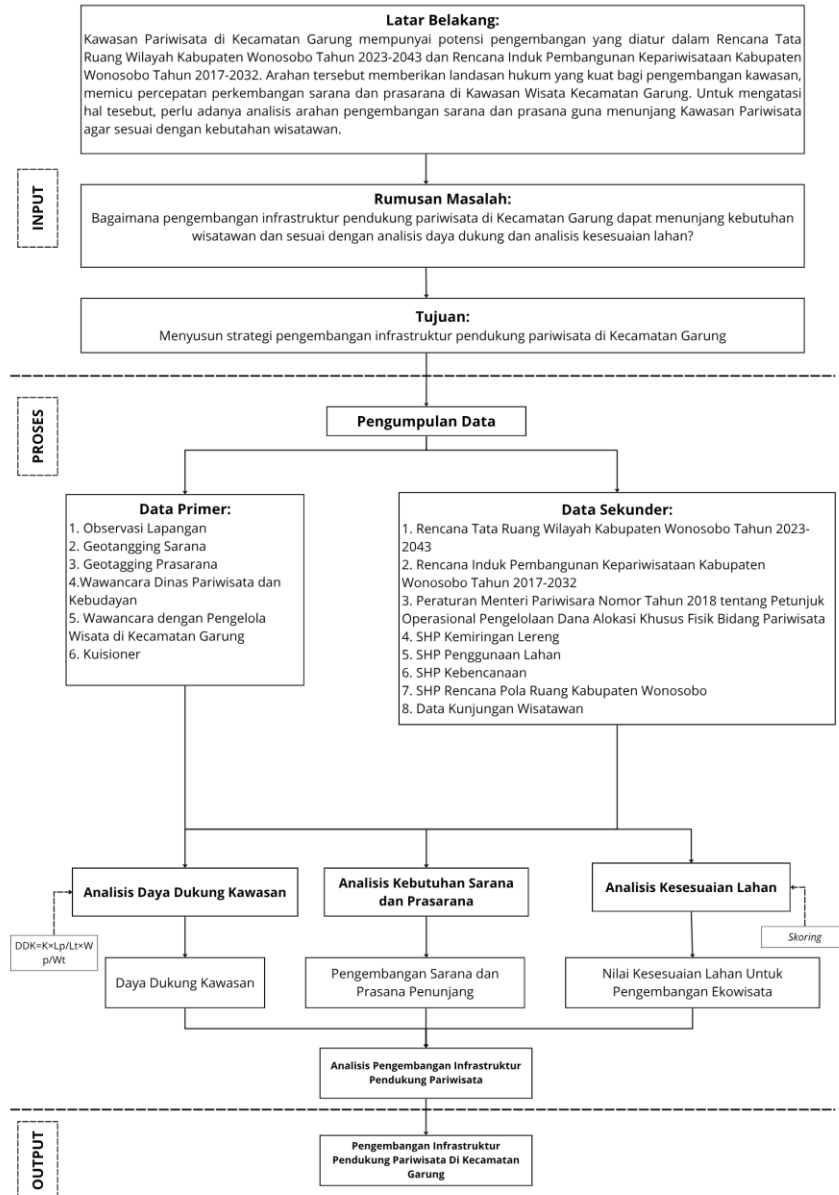


## BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

### 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka konsep penelitian ini merupakan alur logis berpikir antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengumpulan data, analisis yang digunakan serta output yang diharapkan. Berikut merupakan bagan konsep perencanaan pada penelitian ini:



Sumber: Hasil Analisis, 2025

**Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan**

Dalam konsep perencanaan menjelaskan latar belakang yang diawali dengan potensi pengembangan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) sehingga memicu percepatan pembangunan sarana dan prasarana. Rumusan masalah dilihat dari kondisi sarana dan prasarana eksisting di Kawasan Pariwisata Kecamatan Garung yang ditinjau dari kesesuaian sarana prasarana yang dapat menunjang wisatawan. Kemudian dari latar belakang dan rumusan masalah dapat ditetapkan tujuan yaitu menyusun strategi pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kecamatan Garung. Alur analisis diawali dengan pengumpulan data primer (observasi, *geotagging*, wawancara dengan pengelola kawasan wisata, dan kuesioner wisatawan) serta data sekunder (RTRW, RIPPDA, dan data spasial). Analisis dilakukan secara terstruktur meliputi: analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kesenjangan sarana dan prasarana; analisis daya dukung untuk menentukan kapasitas kawasan; dan analisis kesesuaian lahan dengan metode skoring untuk memperoleh nilai pengembangan kawasan. Metode analisis spasial seperti *overlay* dengan *intersect* untuk melihat arah pengembangan infrastrukturnya. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat spasial dan strategis, mempertimbangkan aspek teknis, kebutuhan wisatawan, serta keselarasan dengan kebijakan RTRW dan RIPPDA.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tata ruang merupakan bentuk susunan ruang yang mencakup struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW sendiri merupakan dokumen hasil perencanaan tata ruang pada suatu wilayah yang memiliki kesatuan geografis beserta seluruh unsur yang berkaitan di dalamnya, dengan batas wilayah dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif. Penyusunan RTRW mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Rencana Detail Tata Ruang. Dalam RTRW tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota terdapat beberapa komponen utama, yaitu rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Keberadaan RTRW menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan program strategis, serta proses pemberian izin pemanfaatan ruang. Selain itu, RTRW berperan dalam menjaga keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan upaya pelestarian

lingkungan. Melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan potensi wilayah, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, RTRW mendukung terwujudnya pembangunan yang terarah, terkendali, dan berkelanjutan.

### **2.2.2 Infastruktur Pendukung Pariwisata**

Infrastruktur adalah fasilitas yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sarana dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara atau wilayah (Syarifuddin et al., 2022). Infrastruktur pendukung pariwisata merupakan fasilitas digunakan untuk aktivitas pariwisata. Infrastruktur ini mencakup jaringan transportasi, utilitas dasar, fasilitas pelayanan umum, dan sarana penunjang aktivitas wisata. Kualitas infastruktur pada kawasan pariwisata menjadi faktor kunci dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Mirah et al., 2024). Infrastruktur merupakan komponen penting dalam pengembangan destinasi karena kualitas dan ketersediaannya berpengaruh pada kepuasan wisatawan serta daya tarik suatu kawasan. Keberadaan infrastruktur yang berstandar baik memungkinkan destinasi bersaing dengan kawasan wisata lain dalam menarik minat wisatawan. Terdapat jenis jenis infastruktur pendukung kawasan pariwisata yang dapat dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata :

1. Jalan Setapak
2. Pusat Informasi Wisata
3. Listrik
4. Petunjuk Arah/Jalan
5. Ruang Ganti atau Toilet
6. Toko Suvenir
7. Gapura Identitas/Papan Selamat Datang
8. Keamanan

Standarisasi digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat kelayakan dan kecukupan infrastruktur dalam mendukung aktivitas pariwisata. Melalui standar yang telah ditetapkan, kondisi eksisting fasilitas dapat dibandingkan dengan kebutuhan ideal kawasan wisata sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian dan kebutuhan pengembangannya. Berikut merupakan standarisasi menurut Permenpar Nomor 3 Tahun 2018:

Tabel 2. 1 Standar Kriteria Infastruktur Pariwisata Permenpar Nomor 3 Tahun 20218

Kriteria	Standar/Penempatan
Jalan setapak	Lebar minimum 1,5 meter
Dermaga wisata	Pola penempatan dermaga terdiri dari <i>wharf, pier, dan Jetty</i> - Terletak di pusat kota harus strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung.
Pusat informasi wisata	- Terletak di tempat kedatangan seperti: terminal bus, bandara, stasiun maupun pelabuhan, harus strategis, mudah dilihat dan dicapai pengunjung - Terletak di daya tarik wisata, harus strategis dan mudah dilihat oleh pengunjung
Listrik (Tiang lampu)	- Jarak minimum tiang lampu penerangan yang berdiri sendiri adalah 6-7 meter antar lampu - Ketinggian tiang antara 18-30meter untuk penerangan tinggi digunakan untuk penerangan area parkir, area rekreasi dan jalan bebas hambatan, ketinggian tiang 3-4,5 meter untuk penerangan menengah umumnya digunakan untuk penerangan sepanjang jalur pedestrian.
Penunjuk arah/jalan	- Penempatan rambu penunjuk arah adalah pada posisi persimpangan jalan; - Jarak horizontal antara ujung jalan dan ujung rambu penunjuk arah adalah 1.200 milimeter. Namun terdapat keterbatasan lahan, maka jaraknya dapat menjadi 450 meter untuk perkotaan dan 600 meter untuk pedesaan
Ruang ganti dan atau toilet	- Menyediakan kloset (WC), urinoar, wastafel, handicap, toilet paper, jetspray/washlet, pengering tangan/tisu, cermin, gayung dan tempat air, tempat sampah, saluran pembuangan, penjaga toilet, janitor, pintu masuk utama, kubikal, pintu toilet untuk orang berkebutuhan khusus.

Kriteria	Standar/Penempatan
Toko souvenir	- Mudah diakses dan dekat dengan destinasi wisata, petunjuk arah dan papan nama kios cendera mata/souvenir memiliki tulisan yang terbaca dengan jelas dan mudah terlihat
Rumah makan	-Menampilkan kuliner tradisional yang sudah diseleksi -Minimum 5 jenis kuliner, maksimal 20 jenis kuliner dan tidak boleh ada duplikat -Kapasitas maksimal sentra, maksimal 300 orang, 300 kursi dan 50-60 meja serta tempat cuci tangan sebanyak 12 titik.
Gapura identitas/papan selamat datang	- Penempatan gapura identitas hendaknya strategis dan mudah terlihat

Sumber: Permenpar No. 3 Tahun 2018

### 2.2.3 Daya Dukung Kawasan

Daya dukung lahan merupakan konsep yang kondisi suatu kawasan dalam mendukung aktivitas di atasnya tanpa mengalami degradasi (Island et al., 2024). Konsep daya dukung lahan sering digunakan dalam perencanaan wilayah untuk menilai kesesuaian lahan dengan tingkat pemanfaatan, dengan mempertimbangkan beberapa factor (Rexa et al., 2023). Daya dukung kawasan merupakan jumlah maksimal wisatawan (orang) yang mampu ditampung suatu kawasan pada waktu yang disediakan tanpa menimbulkan kerusakan dan gangguan pada manusia maupun alam (Handayani et al., 2024). Daya dukung kawasan di dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDK = K \times \frac{Lp}{Lt} \times \frac{Wp}{Wt}$$

Keterangan:

DDK : Daya Dukung Kawasan (orang)

K : Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area (orang)

Lp : Luasan area (m<sup>2</sup>) atau Panjang area (m) yang dapat dimanfaatkan

Lt : Unit area kategori tertentu (m<sup>2</sup> atau m)

Wt : Waktu yang disediakan untuk kegiatan dalam satuan hari (jam)

#### **2.2.4 Kesesuaian Lahan**

Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu, seperti pertanian, permukiman atau pariwisata, yang dinilai berdasarkan karakteristik biofisik seperti tanah, iklim, topografi dan hidrologi (Salim, 2024). Menurut (FAO, 1976) kesesuaian lahan merupakan proses evaluasi lahan dengan membandingkan karakteristik fisik lahan dengan persyaratan penggunaan lahan tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan hambatan lahan terhadap fungsi atau kegiatan yang direncanakan.

Kesesuaian lahan untuk pariwisata juga diatur dalam Prinsip Pengembangan Ekowisata Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah. Penelitian (Sumaraw et al., 2020) menjelaskan prinsip pengembangan ekowisata menggunakan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- f. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosialbudaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- g. Menampung kearifan lokal.

Penelitian tersebut menghasilkan variabel, skor dan bobot yang digunakan dalam menghitung kesesuaian lahan untuk pengembangan pariwisata. Nilai skor digunakan sebagai acuan kondisi wilayah tersebut, sedangkan bobot digunakan dalam menilai tingkat kepentingan satu variabel dalam kawasan tersebut. Penentuan skor dilakukan berdasarkan tingkat kesesuaian setiap

parameter terhadap pengembangan kawasan wisata. Parameter yang memiliki kondisi paling mendukung diberikan nilai skor lebih tinggi dibandingkan parameter yang memiliki keterbatasan atau kurang mendukung kegiatan wisata. Sementara itu, pembobotan digunakan untuk menunjukkan tingkat pengaruh atau tingkat kepentingan masing-masing parameter dalam mendukung pengembangan pariwisata. Parameter yang dianggap memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberlanjutan dan pengembangan kawasan wisata diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan parameter lainnya. Proses skoring dan pembobotan tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh nilai akhir kesesuaian lahan melalui perhitungan total dari seluruh parameter yang digunakan dalam penelitian. Menurut (Maharani, 2024) berikut merupakan variabel, pembobotan dan skor yang digunakan dalam perhitungan kesesuaian wisata:

**Tabel 2. 2 Tabel Variabel Kesesuaian Lahan**

No	Variabel	Jenis	Justifikasi	Bobot	Tinggi Skor 3	Sedang Skor 2	Rendah Skor 1
1	Kemiringan Lahan/Topografi		Kemiringan lahan mempengaruhi stabilitas bangunan, risiko longsor, serta kenyamanan wisatawan. Dalam perencanaan wisata alam, kemiringan tertentu dapat menjadi potensi ( <i>viewpoint</i> ), namun lereng curam (>25–40%) umumnya memiliki keterbatasan pembangunan. Oleh karena itu, variabel ini menentukan tingkat kesesuaian fisik lokasi.	5	Landai	Agak Curam	Curam
2	Ketersediaan Sumber Air		Air merupakan prasarana dasar bagi aktivitas wisata (toilet, penginapan, kuliner). Ketersediaan dan keberlanjutan sumber air menentukan kapasitas pelayanan kawasan serta berkaitan langsung dengan daya dukung lingkungan.	10	Ada	Kurang	Tidak Ada

No	Variabel	Jenis	Justifikasi	Bobot	Tinggi Skor 3	Sedang Skor 2	Rendah Skor 1
3	Kondisi Lahan		Meliputi jenis tanah, tutupan lahan, dan penggunaan lahan eksisting. Kondisi lahan menentukan daya dukung struktural serta dampak lingkungan akibat pembangunan. Lahan yang masih alami atau berfungsi lindung memerlukan pembatasan, sedangkan lahan terbangun atau budidaya lebih fleksibel untuk dikembangkan.	10	Tidak Produktif	Kurang Produktif	Produktif
4	Pengembangan Lahan		Variabel ini menilai peluang ekspansi atau intensifikasi pembangunan berdasarkan ketersediaan ruang dan kebijakan tata ruang. Pengembangan lahan harus mempertimbangkan pola ruang RTRW agar tidak terjadi alih fungsi yang bertentangan dengan regulasi.	15	Bisa Berkembang	Berkembang Bersyarat	Tidak Bisa Berkembang
5	Konservasi		Kawasan wisata alam sering berada di wilayah sensitif ekologis. Aspek konservasi diperlukan untuk menjaga keanekaragaman hayati, kualitas air, serta fungsi lindung kawasan. Variabel ini memastikan pengembangan tidak mengurangi nilai ekologis dan tetap mendukung prinsip pariwisata berkelanjutan.	15	Sangat Perlu Dikonservasi	Perlu Dikonservasi	Tidak Perlu Dikonservasi
Aksesibilitas							
6	Kondisi Jalan dari Jalan raya ke Lokasi	Sosial	Kualitas jalan (lebar, permukaan, kemiringan) mempengaruhi kemudahan mobilitas wisatawan dan distribusi logistik. Infrastruktur jalan yang memadai meningkatkan daya tarik dan kelayakan investasi wisata.	5	Mudah	Cukup Sulit	Sulit
	Jarak Tempuh Ke Pusat Kota (PKW)		Jarak terhadap pusat kegiatan wilayah mempengaruhi waktu tempuh, biaya perjalanan, dan potensi pasar wisatawan. Semakin dekat dengan PKW, semakin tinggi peluang kunjungan.	5	Dekat	Cukup Jauh	Jauh

No	Variabel	Jenis	Justifikasi	Bobot	Tinggi Skor 3	Sedang Skor 2	Rendah Skor 1
7	Keamanan		Keamanan fisik (rawan bencana, kriminalitas, longsor) dan rasa aman wisatawan merupakan faktor utama dalam keberlanjutan destinasi. Kawasan dengan risiko tinggi membutuhkan mitigasi khusus sebelum dikembangkan.	10	Aman	Kurang Aman	Tidak Aman
8	Edukasi		Pariwisata modern tidak hanya rekreatif tetapi juga edukatif ( <i>ecotourism</i> ). Potensi edukasi meningkatkan nilai tambah destinasi, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta mendukung pelestarian lingkungan melalui interpretasi alam.	10	Mengandung Unsur Edukasi	Kurang Mengandung Unsur Edukasi	Tidak Mengandung Unsur Edukasi
9	Pemberdayaan Masyarakat Lokal		Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan penyediaan jasa wisata meningkatkan dampak ekonomi, mengurangi konflik sosial, serta memperkuat keberlanjutan kawasan. Prinsip <i>community-based tourism</i> menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi berkelanjutan.	10	Diberdayakan	Kurang Diberdayakan	Tidak Diberdayakan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Nilai kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata yang didapatkan dikategorikan menjadi beberapa kategori sesuai dengan hasil akhir yaitu Sangat sesuai (S1), Sesuai (S2), sesuai bersyarat (S3), dan tidak sesuai (N). Penentuan kategori penilaian dengan kategori sebagai berikut:

1. Sangat sesuai (S1), hasil penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata diangka 78%-100%
2. Sesuai (S2), hasil penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata diangka 55%-78%
3. Sesuai bersyarat (S3) hasil penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata diangka 33%-55%
4. Tidak sesuai (N) hasil penilaian kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata diangka <33%

Nilai kesesuaian lahan untuk pengembangan ekowisata didapatkan dari jumlah total skor x bobot yang dibagi dengan total skor 285 lalu dibagi 100% untuk mendapatkan presentase yang sesuai dengan kategori.